RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025 – 2029

H. Herman Deru — Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang — Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho-Nya, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029 telah tersusun. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan kebutuhan untuk mengadaptasi dinamika pembangunan terkini dan prospek masa depan, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Pada prinsipnya, dokumen ini menyajikan: latar belakang dan dasar hukum penyusunan; gambaran umum pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; isu strategis terkait tugas dan fungsi urusan Kebudayaan dan Pariwisata; tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan; indikasi rencana program dan kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan; penetapan indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya dokumen ini. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang akurat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun mendatang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan yang harmonis, sinergis, dan berkesinambungan, serta dapat dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab agar bermanfaat bagi kemajuan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 18 November 2025

Plt. KEPALA DINAS,

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PANDJI TJAHJANTO, S.Hut., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196711021994031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8
2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 15
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .. 25
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 26
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 26
2.2.2 Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan 29

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.1 Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan ... 39
3.2 Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan ... 40
3.3 Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan 49
3.4 Penahapan Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan 49
3.5 Penyajian Lokus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan 50
3.6 Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel 51

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

4.1 Teknik Merumuskan dan Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 53

4.2 Subkegiatan Prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 87

4.3 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan 90

BAB V PENUTUP 95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2.2	Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan	13
Tabel 2.3	Jabatan Struktural dan Fungsional	13
Tabel 2.4 T-C. 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	19
Tabel 2.5	Perumusan Permasalahan Capaian Kinerja berdasarkan GAP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	22
Tabel 2.6 T-C. 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	24
Tabel 2.7	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	37
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	42
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	50
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ...	51
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra	54
Tabel 4.2	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan	74
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	87
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	91
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan 28
Gambar 2.2 Indeks Daya Saing Kepariwisataan 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran OPD sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumberdaya, sumber dana serta fasilitas/aset yang dimiliki OPD dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja OPD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.

Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar dibanding fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan yang merupakan implementasi dari hasil sebuah perencanaan.

Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap

perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 juga memberikan amanat bagi daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Pariwisata yang terintegrasi dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011.

Penyusunan dan penetapan Renstra SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Kewajiban ini disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan adalah Dokumen Perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan Pembangunan disertai dengan Indikasi Pendanaan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 tidak terlepas

dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan SKPD di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan landasan hukum pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212).
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Presiden RI No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Berita Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 81).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 bermaksud meningkatkan realisasi target indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kebudayan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, adalah :

1. Tersusunnya Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025-2029;
2. Teridentifikasinya program, kegiatan dan indikasi sub-kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2025-2029;
3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun untuk jangka waktu sampai 5 (lima) tahun;

4. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi realisasi target indikator kinerja, program, kegiatan dan Sub-kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan untuk Rencana Kerja Tahunan maupun Lima Tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.
1.3 Maksud dan Tujuan.
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.1 Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
3.2 Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
3.3 Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
3.4 Penahapan Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
3.5 Penyajian Lokus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
3.6 Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

4.1 Teknik Merumuskan dan Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

4.2 Sub Kegiatan Prioritas Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah

4.3 Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Tugas dan Fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan industri dan ekonomi kreatif, pengembangan budaya dan pengkajian budaya;
b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan industri dan ekonomi kreatif, pengembangan budaya dan pengkajian budaya;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
d. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara serta pengembangan kebudayaan;

e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
f. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan adalah :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat membawahi :
    1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Destinasi, membawahi :
    1. Seksi Daya Tarik Wisata;
    2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif; dan
    3. Seksi Usaha Kepariwisatan.
d. Bidang Pengembangan Pemasaran, membawahi :
    1. Seksi Pemasaran Luar Negeri;
    2. Seksi Pemasaran Dalam Negeri; dan
    3. Seksi Analisa Pasar.
e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
    1. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
    2. Seksi Nilai Budaya dan Bahasa Daerah;
    3. Seksi Atraksi Budaya dan Film.
f. Bidang Dokumentasi dan Publikasi Budaya, membawahi :
    1. Seksi Pengelolaan Data Budaya;
    2. Seksi Pengkajian dan Kerjasama Budaya;
    3. Seksi Publikasi Budaya.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :
    a. UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, membawahi :
        1. Sub Bagian Tata Usaha;
        2. Seksi Museum;

3. Seksi Pengelola Taman Budaya Sriwijaya.

b. UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, membawahi :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya;
3. Seksi Situs Bukit Siguntang.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Lampiran : Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor : 51 Tahun 2016
Tentang : Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

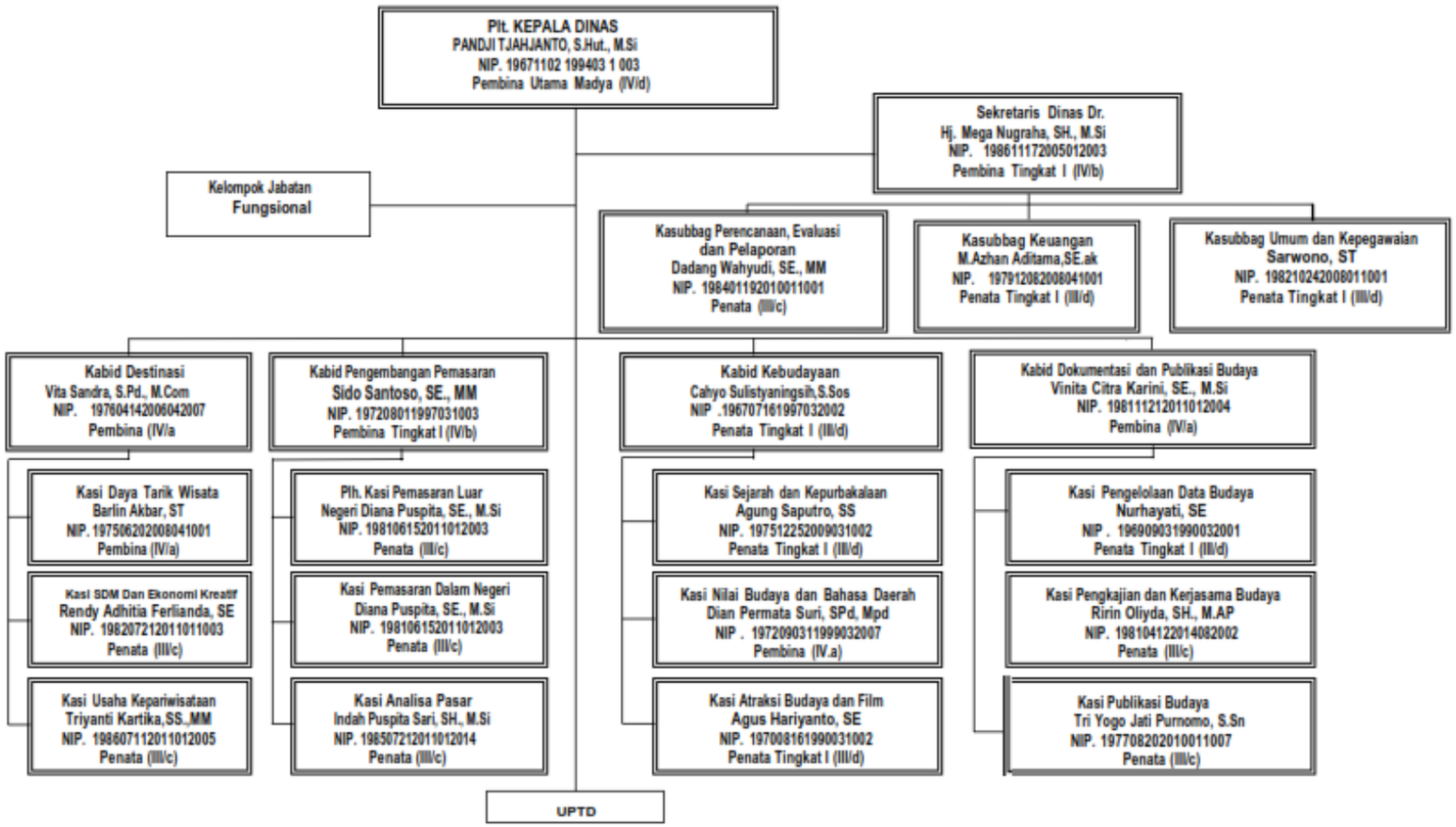

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TAMAN WISATA BUDAYA KERAJAAN SRIWIJAYA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24 Tahun 2018
TANGGAL : 29 Januari 2018

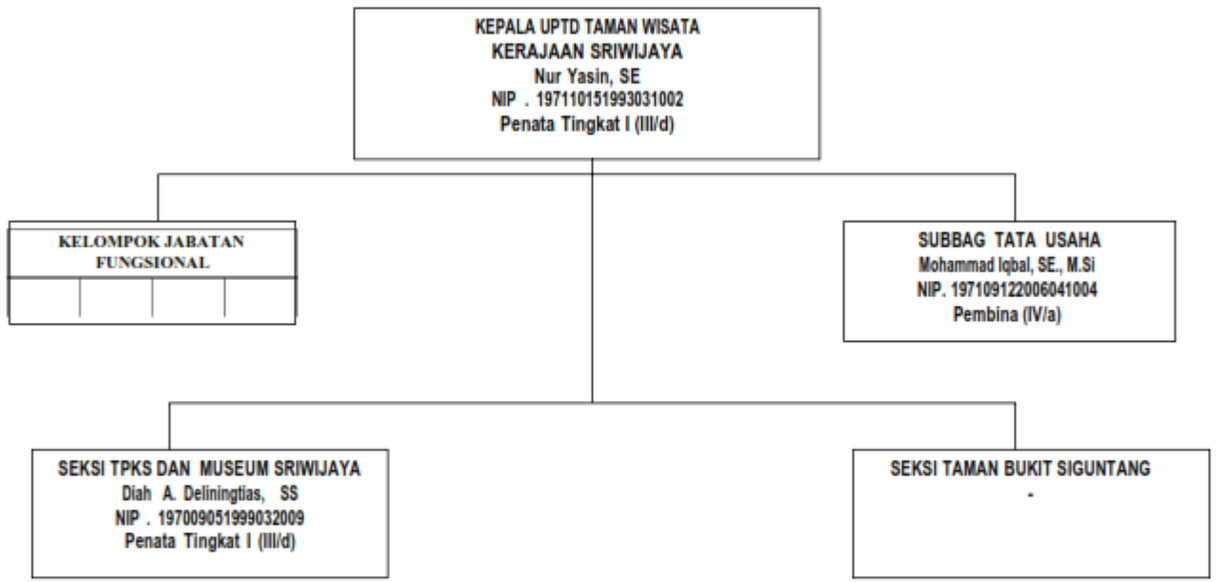

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24 Tahun 2018
TANGGAL : 29 Januari 2018

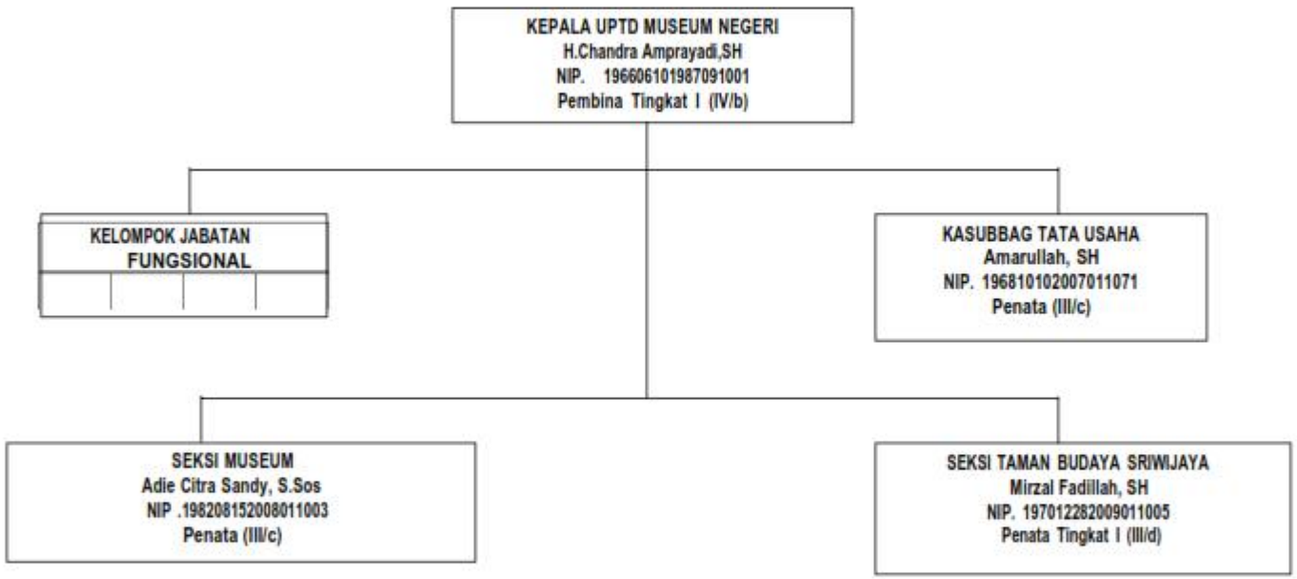

2.1.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.1.2.1 Susunan Kepegawaian

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan memiliki Jumlah Pegawai 242 orang dengan komposisi PNS sebanyak 86 orang, Honorer 6 sebanyak orang, TKPD sebanyak 4 orang, PHL sebanyak 138 orang dan Tim Digital Marketing sebanyak 8 orang terdiri dari :

Tabel 2.1 Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan.

No	Kategori	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan						
			L	Pr	S3	S2	S1	Diploma	SMU	SMP	SD
1.	PNS	83 Orang	39	44	1	23	36	4	14	4	1
2	PPPK	240 Orang	134	106							

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2025

Tabel 2.2 Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
IV	17 Orang
III	56 Orang
II	10 Orang
I	0 Orang
Jumlah	83 Orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2025

Tabel 2.3 Jabatan Struktural dan Fungsional.

No	Jabatan Struktural			Jabatan Fungsional
	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	
1.	1 Orang	6 Orang	19 Orang	0 Orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2025

2.1.2.2 Aset yang dikelola

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mempunyai aset yang dikelola berupa, tanah, gedung/bangunan, perlengkapan, peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya, terdiri dari :

1) Tanah

Tanah yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan ada 9 persil.

- Untuk tanah bangunan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata prov. Sumsel beralamat di Jl. Demang Lebar Daun Kav. IX Palembang seluas 2.060 m².
- Untuk tanah Rumah Dinas sebanyak 6 persil beralamat di Komplek Bukit Sejahtera/Polygon Palembang adapun luas tanah tersebut yaitu: 5 persil masing-masing seluas 252 m², dan 1 persil seluas 308 m².
- Untuk tanah bangunan museum sebanyak 1 persil beralamat di Jl. Hisbullah Kelurahan Karang Anyar Ilir Barat I Palembang.
- Untuk tanah bangunan bersejarah sebanyak 1 persil beralamat di Jl. Sultan M. Mansyur Kelurahan Bukit Lama Ilir Barat I Palembang.
- Untuk tanah bangunan museum Negeri Sumsel sebanyak 1 persil beralamat Jalan Srijaya I No. 288 Km. 5,5 Palembang.

2) Bangunan

Bangunan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sumsel yaitu berupa :

- Bangunan gedung kantor yang berlokasi di Jl. Demang Lebar Daun Kav. IX Palembang terdiri dari 3 lantai yang luasnya 1.260 m², bangunan rumah penjaga kantor, musholla dan kantin yang luasnya 122,5 m² dan pos jaga yang luasnya 6 m².
- Bangunan yang terletak di Jl. Hisbullah Kelurahan Karang Anyar Ilir Barat I Palembang terdiri dari : Bangunan museum, Gedung Pos Jaga, Teater mini, Gedung terminal dan Gedung tempat pergelaran seni.
- Bangunan yang terletak di Jl. Sultan M. Mansyur Ilir Barat I Palembang terdiri dari : Bangunan bersejarah, Gedung Pos jaga, Gedung Menara Peninjau dan Musholla.

- Bangunan yang terletak di jalan Rumah Sakit AK. Gani Palembang berupa : Kantor dan Tourism Information Office (TIO).
- Bangunan Rumah Dinas yang terletak di Komplek Bukit Sejahtera Polygon Palembang sebanyak 6 unit rumah.
- Bangunan yang terletak di jalan H. Bastari, Jakabaring Palembang berupa Gedung Serba Guna dan Gedung Graha Budaya.
- Bangunan museum Negeri Sumsel sebanyak 1 persil beralamat Jalan Srijaya I No. 288 Km. 5,5 Palembang.

3) Peralatan dan Mesin

Aset berupa peralatan dan mesin yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

a) Alat-alat angkutan berjumlah 22 buah dengan rincian sebagai berikut :
   1. Kendaraan roda 4 sebanyak 19 unit.
   2. Kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit.

4) Alat-alat Kantor antara lain :

AC, Komputer, Laptop, Printer, Meja rapat, Meja Kerja, Filling Cabinet, Lemari Etalase, Lemari hias, Cermin hias, Kipas Angin, Televisi, Faximile, Telepon, Kursi Keja, Kursi tamu, Peralatan musik, I Pad, Infokus dan lain-lain.

5) Benda-benda museum antara lain :

Mata Uang Lokal, Gelang Gepeng, Teratai, Sumping, Pending, Lukisan, Kain Ikat-Ikat, Lemari Pengantin, Cerek Kuningan, Dodot, Kalung Kebo Munggah, Badong, Kepeak Cupak, Gerabah Keramik, dan lain-lain.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, sesuai tugas fungsinya dalam hal kebudayaan yang meliputi

penyelenggaran kegiatan event seni dan budaya, bimbingan teknis kebudayaan, inventarisasi sejarah dan kepurbakalaan yang dilaksanakan melalui program pengembangan dan pengkajian budaya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pariwisata yang meliputi pembinaan usaha pariwisata, standarisasi bidang pariwisata, penyelenggaraan promosi, pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata, dan pengembangan SDM kepariwisataan, yang dilaksanakan melalui program pengembangan pemasaran pariwisata dan program pengembangan destinasi pariwisata.

Deskripsi pelayanan tersebut, diagendakan akan dilaksanakan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja daerah yang meliputi aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas fungsinya yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Sejalan dengan agenda tersebut, pembangunan Kebudayaan dan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendinamisasi aktivitas sosial ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan lokal dan regional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri masyarakat Sumatera Selatan dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaaan alam dan budaya masyarakatnya untuk diperkenalkan pada dunia luar.

Dalam proses pelaksanaannya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kepariwisataan, yaitu berperan penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap dinamika sosial dan budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu

lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan, dimana keragaman tersebut tersebar di setiap kabupaten/kota destinasi dengan dukungan daya daya tarik wisatanya baik berupa wisata alam, wisata tirta, dan wisata sejarah/budaya, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel berbintang, non bintang, restoran dan rumah makan, dan lain-lain.

Sejalan dengan bergulirnya roda pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata yang dilakukan, perubahan menuju terwujudnya kemapanan tata pemerintahan telah menampakan hasil yang cukup positif. Kondisi ini terlihat dari komitmen untuk menetapkan arah dan tujuan serta target-target pembangunan yang akan dicapai dalam setiap periode perencanaan (jangka pendek dan jangka menengah sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2024-2026, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan adalah melalui upaya:

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya pariwisata, dengan kajian-kajian terpadu, pengembangan paket-paket wisata unggulan, menata kawasan-kawasan pengembangan pariwisata dan meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pengembangan pariwisata;
2. Menumbuhkembangkan peran dan partisipasi pemangku kepentingan (*Stakeholders*) dalam mengembangkan Kebudayaan dan pariwisata daerah;
3. Penyebarluasan informasi kajian kebudayaan dan pemasaran pariwisata;
4. Perkuatan kemampuan institusi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dapat menempatkan posisi strategis dalam pembangunan daerah dan peranannya dalam pembangunan nasional antara lain :

- Pelayanan informasi pada masyarakat umum tentang kebudayaan dan kepariwisataan.
- Pelayanan informasi perjalanan wisata (wisatawan).
- Pelayanan industri / usaha pariwisata.

Selama periode Renstra tahun 2025-2029, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan memiliki 12 indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi kinerja perangkat daerah. Masing-masing indikator kinerja ini memiliki target yang harus mampu untuk dicapai dalam satu tahun kinerja. Maka dari itu, melalui Tabel T-C. 23 di bawah ini, akan dijabarkan target kinerja dan realisasi dari masing-masing indikator yang mampu dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 2.4 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Wisatawan Mancanegara				78,186	8,075	8,479	8,093	1.186	10,119	2,015	1,130	385	2.004	12,94%	24,95%	56,07%	4,75%	168,97%
2	Jumlah Wisatawan Nusantara				9,064,605	820,410	861,431	904,503	1.620.000	2,002,749	2,810,342	1,542,485	3.697.666	16.123.645	22,09%	342,55%	179,06%	438,65%	995,28%
3	Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi, termanfaatkan, dan dikembangkan				550	650	750	850	587	550	559	559	779	559	100%	86%	74,53%	91,64%	95,22%
4	Angka Kumulatif Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terlindungi, termanfaatkan, dan dikembangkan				550	600	650	700	970	602	924	924	907	907	109,45%	154%	142,15%	129,57%	100%
5	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan				32	36	40	44	48	34	43	44	49	50	106,25%	119,44%	110%	111,36%	104,16%
6	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan				6	8	10	12	28	8	7	26	29	39	133,33%	87,5%	290%	241,67%	139,28%
7	Jumlah Pergelaran Seni				10	11	12	13	42	-	-	40	35	45	-	-	333,33%	269,23%	107,14%

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
8	Jumlah Kunjungan Museum				59,544	71,452	85,743	102,892	82.321	33,807	35,294	78,341	105.118	88.351	56,77%	49,39%	91,36%	102,16	107,32%
9	Jumlah Desa Wisata yang difasilitasi/ ditetapkan				n/a	20	30	40	90	n/a	11	32	32	135	n/a	55%	106,67%	80%	150%
10	Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi Standar				n/a	n/a	n/a	n/a	10	n/a	n/a	n/a	n/a	110	n/a	0	0	0	1.100%
11	Jumlah Tenaga Kerja Usaha Pariwisata				n/a	n/a	n/a	n/a	61.025	n/a	n/a	n/a	n/a	62.000	n/a	0	0	0	101,59%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2025

Berdasarkan informasi Tabel T-C. 23 di atas, dapat dijelaskan bahwa upaya pencapaian indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat dinamis setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan karena dinamika mobilisasi aktivitas kebudayaan dan pariwisata yang sangat dipengaruhi oleh beberapa hal yang bersifat mikro dan makro.

Kondisi paling mencolok terjadi pada periode tahun 2019 akhir hingga tahun 2021, di mana seluruh dunia dilanda pandemi Covid-19. Pandemi ini berdampak sangat signifikan bagi kehidupan pariwisata di Sumatera Selatan. Hal yang paling bisa terlihat dampaknya adalah pada turunnya angka wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara yang datang ke Sumatera Selatan. Tidak hanya berdampak pada jumlah wisatawan saja, pandemi Covid-19 juga berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan masyarakat ke museum. Hal ini diakibatkan karena sempat terjadi *lockdown* sehingga semua museum pun akhirnya harus tutup dan tidak dapat beroperasi.

Terlepas dari kondisi tersebut, beberapa indikator kinerja yang lain tetap menunjukkan tren yang positif, di mana mampu untuk memenuhi target tiap tahunnya. Misalnya terlihat dari Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi, termanfaatkan, dan dikembangkan yang mampu untuk memenuhi target tiap tahunnya. Namun, tetap ada hal yang menjadi perhatian di tahun 2024, khususnya kunjungan museum yang menurun. Diharapkan, melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat terselenggara berbagai kegiatan yang menjadi stimulan bagi masyarakat untuk bisa datang berkunjung ke museum.

Tabel 2.5
Perumusan Permasalahan Capaian Kinerja berdasarkan GAP
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target 2029	GAP	Perumusan Masalah (GAP)
1	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	2.004 orang	2.557 orang	553	Setelah dibukanya kembali status internasional Bandara SMB II diharapkan dapat menjadi titik balik peningkatan jumlah wisman di sumsel dan promosi dan akses internasional perlu diperkuat
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	16.123.645 orang	23.155.727 orang	7.032.082	Butuh peningkatan layanan, atraksi, event-event yang ada di sumsel
3	Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi, termanfaatkan, dan dikembangkan	559 Cagar Budaya	571 Cagar Budaya	12	Masih banyak objek belum ditetapkan proses belum menjangkau seluruh daerah
4	Angka Kumulatif Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terlindungi, termanfaatkan, dan dikembangkan	907 OPK	957 OPK	50	Belum seluruh kekayaan budaya lokal diusulkan sebagai WBTB
5	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan	50 WBTB	60 WBTB	10	Kegiatan belum merata, belum rutin di semua wilayah dilakukan pemerataan ke semua wilayah untuk dilakukan pendataan
6	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	39 Cagar Budaya	50 Cagar Budaya	11	Identifikasi belum menyeluruh, belum berbasis sistem digital dan pendataan belum merata
7	Jumlah Pergelaran Seni	45 pergelaran	53 pergelaran	8	Melakukan identifikasi terhadap kegiatan tersebut dan memperbanyak pergelaran seni di sumatera selatan

8	Jumlah Kunjungan Museum	88.351 pengunjung	90.889 pengunjung	2.538	jumlah kunjungan belum optimal, perlu peningkatan kualitas layanan beserta koleksi
9	Jumlah Desa Wisata yang Difasilitasi/Ditetapkan	135 desa	160 Desa	25	Pertumbuhan belum merata dan belum semua desa siap secara kelembagaan dan infrastruktur, perlu peningkatan pendampingan dan promosi
10	Jumlah Usaha Pariwisata yang Memiliki Sertifikasi Standar	110 usaha	110 usaha	0	Masih banyak pelaku usaha belum tersertifikasi, perlu fasilitasi, pelatihan, dan penyadaran pentingnya standar usaha pariwisata
11	Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Rekomendasi Izin	0	63 usaha	63	Masih banyak pelaku usaha pariwisata yang belum memiliki rekomendasi izin karena minimnya proses sosialisasi
11	Jumlah Tenaga Kerja Usaha Pariwisata	62.000 orang	68.451 orang	6.451	Jumlah tenaga kerja cukup besar, tapi belum terdata secara detail dan belum ada sistem peningkatan kompetensi yang berkelanjutan

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tak Langsung	Rp.14.688.444.000	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp.12.604.522.291	n/a	n/a	n/a	n/a	85,81	n/a	n/a	n/a	n/a	-0,39	-2,21
Belanja Langsung	Rp.14.308.716.700	n/a	n/a	n/a	n/a	Rp.12.908.597.728	n/a	n/a	n/a	n/a	90,21	n/a	n/a	n/a	n/a	-36,5	-37,11
Belanja Operasi	n/a	Rp.37.864.454.000	Rp.45.083.477.000	Rp.49.368.088.100	Rp.34.577.730.270	n/a	Rp.35.747.529.454	Rp.43.418.747.714	Rp.45.479.402.505	Rp.31.404.956.119	n/a	94,41	96,31	92,12	90,82	-68,48	-65,88
Belanja Modal	n/a	Rp.4.958.543.000	Rp.2.051.069.600	Rp.2.607.200.000	Rp.1.607.738.942	n/a	Rp.4.759.570.140	Rp.2.024.349.100	Rp.1.736.708.316	Rp.1.607.738.906	n/a	95,99	98,70	66,61	99,99	-24,31	-25,33
	Rp. 28.997.160.700	Rp. 42.822.997.000	Rp. 47.134.546.600	Rp. 51.975.288.100	Rp.35.938.052.820	Rp. 25.513.120.019	Rp.40.507.099.594	Rp.45.443.096.814	Rp.47.216.110.821	Rp.33.012.695.025							

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2025

Berdasarkan informasi T-C. 24 di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat dinamis pertumbuhan dan pengurangan setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh faktor internal daerah maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan kebijakan pusat dan kondisi ekonomi makro.

Pada tahun 2021, terjadi perubahan rincian komponen pendanaan dari yang sebelumnya terbagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung, menjadi Belanja Modal dan Belanja Operasi. Oleh karena itu, di tabel T-C 24 bisa ditemui keterangan "n/a" yang berarti kosong atau tidak ada pendanaan.

Secara singkat, kita bisa melihat bahwa di tahun 2020 yang merupakan fase dimana pandemi Covid-19 terjadi, kondisi pendanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak sebanyak tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023, jumlah anggaran yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara konsisten mengalami penambahan yang signifikan. Penambahan ini berdampak positif pada penyerapan anggaran atau realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang juga turut meningkat. Namun, pada tahun 2024 kondisi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meskipun anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata turun, capaian realisasi pada tahun 2024 terbilang baik karena bisa mencapai angka persentase 90% realisasi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Parameter keberhasilan dari kemajuan sektor kebudayaan dan pariwisata adalah terus meningkatnya Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) serta jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara yang juga bertambah tiap tahunnya. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mencapai keberhasilannya, ada beberapa kelompok yang menjadi fokus sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

1. Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara.

   Dengan bertambahnya atau bertumbuhnya tingkat kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan, ini dapat menjadi penanda bahwa iklim pariwisata di Sumatera Selatan semakin bertumbuh dan semakin baik.

2. Pelaku Usaha dan Industri

   Pelaku usaha dan industri merupakan kelompok yang sangat penting bagi pertumbuhan pariwisata. Mereka merupakan penggerak ekonomi di Masyarakat. Pelaku yang tergabung dalam kelompok ini adalah 1) Pelaku Akomodasi; 2) Pelaku Jasa Perjalanan; 3) Pelaku Kuliner; 4) Atraksi Wisata; 5) Pemandu Wisata; dan 6) Pengrajin dan Pelaku Ekraf.
3. Institusi dan Kelembagaan

   Kelompok ini merujuk pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten/Kota, Asosiasi Kepariwisataan, Masyarakat Sadar Wisata (MASATA).
4. Seniman dan Budayawan

   Pada bidang kebudayaan, para seniman dan budayawan menjadi tonggak penting bagi pelestarian dan pengenalan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan kepada generasi penerus maupun wisatawan. Salah satu kelompok yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dewan Kesenian Sumatera Selatan (DKSS).

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas membantu Gubernur Sumatera Selatan melaksanakan kewenangan desentralisasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan juga memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana di bidang pelestarian dan konservasi budaya serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang Pariwisata. Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor kebudayaan dan pariwisata ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas objek pemajuan kebudayaan serta mutu dan pelayanan sektor pariwisata, oleh karena itu guna mengidentifikasi tantangan dan masalah terkait tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu dapat dijelaskan mengenai tantangan dan masalah yang dihadapi sebagai berikut:

Tantangan pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam periode 2025-2029 kedepan secara umum meliputi :

1. Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain yang diikuti dengan gencarnya promosi pariwisata;
2. Masifnya proses infiltrasi dan akulturasi dari budaya serta gaya hidup asing terhadap dinamika sosial masyarakat;
3. Terdapat kecenderungan proses mematenkan produk kebudayaan lokal oleh pihak asing;
4. Atraksi-atraksi budaya, khususnya di museum-museum di daerah lain di luas Sumatera Selatan sudah semakin menarik dan kreatif;
5. Terdapat potensi pencurian terhadap aset-aset kebudayaan dan permuseuman;
6. Belum optimalnya peran dan perhatian masyarakat, organisasi profesi, pelaku kebudayaan dan pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan perangkat daerah pada bab sebelumnya ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan Kebudayaan dan pariwisata yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Rendahnya aksesibilitas menuju daya tarik wisata, meskipun secara umum panjang dan kondisi jalan sesuai dengan kewenangannya memiliki tingkat kenyaman yang beragam;

Kabupaten/Kota 17	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km)			
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
	2023	2023	2023	2023
Sumatera Selatan	1.121,58	446,85	140,13	70,71
Ogan Komering Ulu	29,35	56,20	15,30	0,80
Ogan Komering Ilir	36,61	48,39	14,67	2,51
Muara Enim	98,53	14,26	3,69	7,00
Lahat	50,57	27,00	5,60	-
Musi Rawas	94,93	11,60	4,52	2,40
Musi Banyuasin	8,39	20,60	11,85	-
Banyuasin	12,78	29,30	7,70	3,90
Ogan Komering Ulu Selatan	148,36	34,47	5,75	3,60
Ogan Komering Ulu Timur	199,34	42,52	16,00	11,60
Ogan Ilir	60,02	87,21	30,05	27,40
Empat Lawang	104,26	28,85	6,75	7,00
Pali	152,50	21,42	7,88	4,20
Musi Rawas Utara	51,66	6,80	1,40	-
Palembang	59,55	9,48	4,80	0,25
Prabumulih	-	-	-	-
Pagar Alam	6,33	4,75	2,97	0,05
Lubuk Linggau	8,42	4,00	1,20	-

Keterangan Data :
Sumber: Dinas PUBM (Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang)

Activate Windows
Go to Settings to activate

Gambar 2.1

2. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang masih perlu ditingkatkan (transportasi, amenitas, infrastruktur). Ini menjadi tanggung jawab bersama antar OPD di lingkup Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkannya;
3. Masih rendahnya kepedulian pelaku usaha pariwisata terkait perizinan usaha berbasis resiko yang disebabkan belum terbiasanya melakukan pengurusan perizinan secara online serta belum optimalnya pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh pihak Kabupaten / Kota;
4. Kurangnya tenaga kerja yang tersertifikasi di bidang kepariwisataan yang berasal dari masyarakat sekitar destinasi maupun lokal daerah yang menimbulkan banyaknya tenaga dari luar daerah yang menempati posisi strategis dalam sektor usaha pariwisata;
5. Sumber daya manusia, dan pemasaran yang belum optimal. Hal ini memberikan implikasi pada lama tinggal (length of stay) dan pengeluaran wisatawan (tourist expenditure), dengan menyediakan lebih banyak atraksi pariwisata dan budaya akan mendorong peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan.
6. Kurangnya sinergi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Provinsi Sumatera Selatan, dan berpotensi tumpang tindih dengan urusan lainnya.

2.2.2 Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumtera Selatan

Pembangunan kepariwisataan sampai saat ini telah menunjukkan kinerja yang membaik. Namun, masih belum mampu mendorong upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan rakyat. Tujuan pembangunan kepariwisataan secara umum adalah untuk meningkatkan kontribusi pariwisata dalam penerimaan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pembangunan. Hal tersebut dihadapkan pula pada semakin ketatnya persaingan antar daerah dalam menciptakan destinasi pariwisata yang mampu mendatangkan wisatawan dan investor, serta semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pembangunan kepariwisataan juga dihadapkan pada situasi belum optimalnya kesiapan destinasi daerah untuk bersaing di pasar global, belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi *(information and communication technology/ICT)* sebagai sarana pemasaran dan promosi pariwisata, masih rendahnya kualitas dan kuantitas serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pariwisata dalam bersaing di pasar global, masih rendahnya jumlah dan nilai investasi di bidang pariwisata, dan belum optimalnya kemitraan dan kerjasama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat *(public and private partnership*).

Fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan kebijakan Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia periode tahun 2025-2029. Dalam meningkatkan pelayanan di bidang pariwisata yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan kepada peluang serta tantangan yang dihadapi untuk diraih dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya.

Peluang yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun pembangunan kebudayaan dan pariwisata, meliputi :

1. Terdapat potensi seni dan budaya yang belum terdata sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya (CB).

2. Masih tersebarnya potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki yang belum terkelola dengan baik;
3. Terbukanya peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan pariwisata;
4. Peningkatan pendapatan masyarakat dunia.

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pariwisata berupa :

1. Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain yang diikuti dengan gencarnya promosi pariwisata;
2. Masifnya proses infiltrasi dan akulturasi dari budaya serta gaya hidup asing terhadap dinamika sosial masyarakat;
3. Terdapat kecenderungan proses mematenkan produk kebudayaan lokal oleh pihak asing;
4. Atraksi-atraksi budaya, khususnya di museum-museum di daerah lain sudah semakin menarik dan kreatif;
5. Terdapat potensi pencurian terhadap asset-aset kebudayaan dan permuseuman;
6. Belum optimalnya peran masyarakat, organisasi profesi, pelaku kebudayaan dan pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata;

Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan meningkatkan daya saing pariwisata. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Upaya peningkatan daya saing pariwisata memerlukan keterlibatan instansi lintas sektoral dengan pertimbangan dan pemikiran multi disiplin seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan. Indikator yang umum digunakan untuk membandingkan daya saing kepariwisataan dimaksud dijelaskan melalui 3 sub indeks, yaitu: (1) kerangka kebijakan pemerintah; (2) infrastruktur dan lingkungan bisnis; dan (3) sumber daya manusia, alam dan budaya. Ketiga sub indeks tersebut, dipilah menjadi 14 pilar pengukuran daya saing, yaitu:

1. **Kebijakan dan Peraturan,** yang meliputi : (1) kepemilikan asing (Investasi); (2) hak kepemilikan usaha; (3) dampak peraturan terhadap usaha; (4) kebutuhan visa; (5) perjanjian ruang udara terbuka; (6) keterbukaan kebijakan pemerintah; dan (7) biaya perijinan usaha
2. **Keberlanjutan Lingkungan,** yang meliputi : (1) peraturan pelestarian lingkungan; (2) penegakan peraturan pelestarian lingkungan; (3) perkembangan industri perjalanan wisata; (4) tingkat emisi karbondioksida/gas rumah kaca; (5) konsentrasi perlindungan alam; (6) ancaman kepunahan spesies hewan; dan (7) perjanjian ratifikasi pelestarian lingkungan
3. **Keselamatan dan Keamanan,** yang meliputi : (1) penanggulangan terorisme; (2) penegakan hukum oleh kepolisian; (3) penanggulangan kejahatan dan kekerasan; dan (4) tingkat kecelakaan lalu-lintas
4. **Kesehatan dan Kebersihan,** yang meliputi: (1) ketersediaan tenaga kesehatan; (2) akses pelayanan kesehatan; (3) akses kelayakan air minum; dan (4) ketersediaan fasilitas tempat tidur rumah sakit
5. **Prioritas mengenai kepariwisataan**, yang meliputi : (1) prioritas kebijakan pemerintah terhadap industri pariwisata; (2) pembiayaan pemerintah bagi pengembangan industri pariwisata; (3) efektivitas pemasaran dan branding untuk meningkatkan kunjungan wisatawan; dan (4) keberadaan/jumlah industri pariwisata
6. **Infrastruktur transportasi udara**, yang meliputi : (1) kualitas pelayanan transportasi udara; (2) ketersediaan kursi penerbangan domestic; (3) ketersediaan kursi penerbangan internasional; (4) volume keberangkatan per 1000 penduduk; (5) kepadatan jumlah penerbangan di bandara; (6) jumlah maskapai penerbangan yang beroperasi; dan (7) jaringan transportasi udara internasional
7. **Infrastruktur transportasi darat**, yang meliputi : (1) kualitas jalan raya; (2) kualitas infrastruktur kereta api; (3) kualitas infrastruktur pelabuhan; (4) kualitas jaringan transportasi domestik; dan (5) tingkat kepadatan lalu-lintas jalan raya
8. **Infrastruktur pariwisata**, yang meliputi : (1) jumlah kamar hotel; (2) penyewaan mobil; dan (3) ketersediaan ATM (anjungan tunai mandiri)
9. **Infrastruktur teknologi informasi**, yang meliputi : (1) usaha

jaringan internet; (2) pengguna internet; (3) jalur sambungan telepon; (4) jumlah pelanggan internet; dan (5) jumlah pengguna telepon selular

10. **Daya saing harga**, yang meliputi : (1) pajak bandara; (2) daya beli masyarakat; (3) cakupan perpajakan; (4) tingkat harga BBM (bahan bakar minyak); dan (5) indeks harga hotel
11. **Sumber daya manusia**, yang meliputi : (1) tingkat pendidikan dasar penduduk; (2) tingkat pendidikan menengah penduduk; (3) kualitas system pendidikan; (4) ketersediaan penelitian dan pelatihan khusus; (5) tingkat pelatihan; (6) jumlah pegawai yang dipekerjakan dan diberhentikan; (7) kemudahan perizinan kerja tenaga asing; (8) resiko penularan HIV; (9) dampak perkembangan HIV terhadap usaha; dan (10) tingkat harapan hidup penduduk
12. **Daya tarik wisata**, yang meliputi: (1) keterbukaan pariwisata; (2) sikap penduduk terhadap wisatawan asing; (3) lama tinggal wisatawan
13. **Sumber daya alam**, yang meliputi: (1) jumlah situs warisan dunia; (2) kawasan yang dilindungi; (3) kualitas lingkungan alam; dan (4) jumlah spesies hewan yang dilindungi
14. **Sumber daya budaya**, yang meliputi: (1) jumlah situs warisan budaya; (2) jumlah stadion olahraga; (3) jumlah pameran dan ekshebisi tingkat internasional; dan (4) ekspor industri kreatif.

Gambar 2.2
Indeks Daya Saing Kepariwisataan

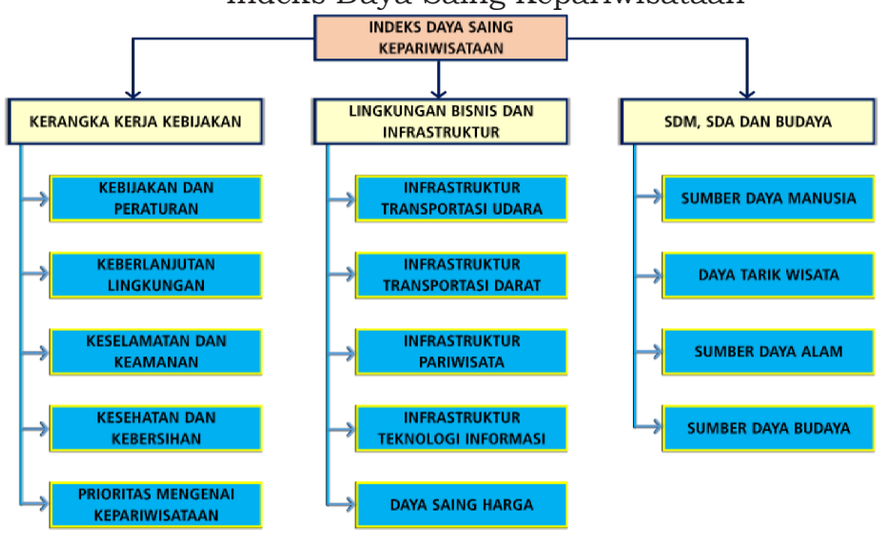

Sumber : World Economic Forum, 2011 / Kementerian Parekraf

Dalam tataran nasional dan regional, untuk meningkatkan daya saing kepariwisataannya, harus pula memperhatikan *positioning* daerah pesaing lain sebagai salah satu input bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Lampung, Provinsi Jambi dan Bengkulu seyogyanya memperhatikan pula perkembangan kepariwisataan di tiga provinsi tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Tantangan Pengembangan Kebudayaan dan Kepariwisataan di Provinsi Sumatera Selatan Pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dari adanya potensi, pelaku, pengelolaan dan tata kelolanya. Dari banyaknya ragam potensi kepariwisataan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan tantangan yang dihadapi cukup komplek dan bervariatif yang merupakan faktor eksternal dan internal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang menjadi instrumennya adalah;

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

Kekuatan yaitu :

1. Memiliki banyak atraksi budaya dan pariwisata.
2. Memiliki bidang yang mengurusi soal destinasi pariwisata dan pemasaran.
3. Memiliki bidang yang mengurusi soal kebudayaan serta dokumentasi dan publikasi budaya.
4. Terdapat event-event pariwisata dan budaya yang rutin dilakukan setiap tahun dan termasuk ke dalam Kalender Event Nasional (KEN).
5. Memiliki data yang terbaharui mengenai persebaran destinasi wisata dan mengenai kebudayaan.
6. Terdapat basis ekonomi kreatif di setiap daerah.
7. Terletak di daerah geografis yang jarang terkena bencana alam.

8. Setiap kabupaten/kota memiliki keunikan tersendiri, khususnya dalam segi bahasa dan budaya.
9. Terdapat banyak situs megalith dan benda peninggalan sejarah.
10 Keanekaragaman budaya dan daya tarik wisata.

Kelemahan yaitu :

1. Inkonsistensi dan kurang sinkronnya pembangunan pariwisata yang terpadu.
2. Kurang dikenalnya potensi budaya dan daya tarik wisata.
3. Kurang optimalnya upaya pembinaan dan pengembangan budaya dan pariwisata daerah.
4. Belum optimalnya pelaksanaan promosi budaya dan pariwisata.
5. Belum optimalnya kapasitas SDM bidang kebudayaan dan pariwisata.
6. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
7. Belum optimalnya pengembangan kearifan lokal yang mendukung pembangunan yang berbasis lokal.

ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

Peluang yaitu :

1. Tersedianya kawasan pusat kegiatan olahraga.
2. Adanya dukungan instansi terkait pusat dan daerah.
3. Adanya potensi daya tarik wisata.
4. Terbukanya peluang investasi di bidang usaha pariwisata dan bidang usaha sektor lainnya di Sumsel.
5. Terbukanya aksesibilitas kunjungan wisatawan dan meningkatnya efektivitas promosi di dalam dan luar negeri.

6. Terbukanya hubungan kerja sama di bidang kebudayaan dan pariwisata di dalam dan luar negeri.
7. Adanya keanekaragaman budaya lokal.
8. Stabilitas keamanan yang semakin kondusif.

Ancaman yaitu :

1. Lunturnya nilai-nilai budaya daerah dalam masyarakat.
2. Kurangnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan Bidang Kebudayaan dan pariwisata.
3. Perlindungan terhadap Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI) budaya daerah belum optimal.
4. Maraknya peredaran narkoba.
5. Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata yang lebih baik di luar Provinsi Sumsel.

Kelemahan pada analisis internal dan peluang pada analisis eksternal menghasilkan beberapa rencana kegiatan seperti:

1. Membangun dan mengembangkan DTW.
2. Menyelenggarakan kegiatan event seni dan budaya.
3. Meningkatkan volume bimtek kebudayaan dan pariwisata.
4. Penyebarluasan bahan promosi dalam negeri dan luar negeri.

Demikian juga kekuatan yang terdapat pada analisa internal dan ancaman pada analisis eksternal menghasilkan rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Menetapkan skala prioritas program dan kegiatan.
2. Menginventarisasi dan memperbanyak kegiatan seni budaya, sejarah dan kepurbakalaan.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM.
4. Meningkatkan penyuluhan sadar wisata (sapta pesona) di Kab/Kota.

Ancaman pada analisis eksternal dan kelemahan pada analisis internal dapat menyusun rencana kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Pembangunan Daya Tarik Wisata.
2. Menyusun buku direktori seni budaya Sejarah dan kepurbakalaan Sumsel.
3. Memperbanyak Bimtek kebudayaan dan pariwisata.
4. Meningkatkan penyuluhan dan ikut serta pada kegiatan promosi dalam dan luar negeri.

Berdasarkan analisa di atas, maka kekuatan dan kelemahan yang ada dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan di Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan sarana yang telah ditetapkan, melalui :

1. Program dan kegiatan pembangunan bidang Nilai budaya, Seni dan Film.
2. Program dan kegiatan pembangunan bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.
3. Program dan kegiatan bidang Promosi Pemasaran Dalam Negeri dan Luar Negeri.
4. Program dan kegiatan pembangunan bidang Dokumentasi dan Publikasi Budaya.

Tabel 2.7

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	**PERMASALAHAN**	**ISU KLHS YANG RELEVAN**	**ISU LINGKUNGAN DINAMIS**			**ISU STRATEGIS**
			GLOBAL	**NASIONAL**	**REGIONAL**	
Kebudayaan dan Pariwisata	1. Sumber Daya Manusia yang Belum Terampil 2. Kurangnya Diversifikasi Ekonomi 3. Kurangnya Investasi pada Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan potensi ekonomi daerah yang belum optimal menjadi salah satu isu yang signifikan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia	*Biodiversity Loss* dan Gangguan Ekosistem	--	--	Hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem merupakan dua sisi mata uang yang sama. Keduanya saling terkait dan menimbulkan dampak yang sangat luas, baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi. Hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan ekosistem merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan planet Bumi. Penguatan mitigasi

						diperlukan mengurangi adanya perubahan iklim yang memberikan dampak negatif pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, perikanan, pariwisata, dan kesehatan. Selain itu juga adanya transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan dan rendah emisi karbon.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.1 Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

Setiap Organiasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan tujuannya masing-masing. Tujuan memiliki peran penting untuk bisa mencapai *goal* yang diinginkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pencapaian tujuan Rencana Strategis (Renstra) yang akan dicapai hendaknya dapat diukur dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar memiliki 2 bidang urusan, yaitu Kebudayaan dan Pariwisata. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan memiliki tujuan "Terwujudnya Berkebudayaan Maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif". Tujuan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebudayaan merupakan fondasi utama dalam membangun jati diri bangsa dan daerah, sekaligus menjadi sumber daya strategis dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing.

Pada masa era globalisasi dan modern seperti saat ini, penguatan budaya lokal menjadi keharusan untuk menjaga identitas budaya. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk selalu berupaya dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap seluruh aspek kebudayaan, baik yang bersifat tangible (berwujud) maupun intangible (tak berwujud), agar tetap lestari, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kemajuan kebudayaan tidak hanya mengacu pada pelestarian nilai-nilai tradisional saja, tetapi juga pada kemampuan masyarakat dalam menjadikan budaya sebagai sumber inspirasi inovasi, kreativitas, dan daya saing di berbagai sektor kehidupan.

Kemudian, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki peranan yang juga tidak kalah penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui strategi pengembangan destinasi wisata yang

terintegrasi, penguatan daya tarik berbasis budaya dan kearifan lokal, peningkatan kualitas layanan dan SDM pariwisata, serta promosi yang efektif dan berkelanjutan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan bertujuan untuk menjadikan sektor ini sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi kreatif, dengan cara mendorong inovasi produk budaya dan industri kreatif yang bernilai ekonomi tinggi namun tetap mencerminkan kekayaan budaya lokal.

Dengan demikian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan berperan dalam pembangunan daerah melalui penguatan budaya dan peningkatan daya saing ekonomi berbasis pariwisata dan kreativitas lokal. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi, tetapi juga tangguh secara budaya dalam menghadapi tantangan masa depan.

3.2 Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

Setiap Organiasi Perangkat Daerah (OPD) memerlukan sasarannya masing-masing. Sasaran memiliki peran penting untuk bisa mencapai *goal* yang diinginkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pencapaian tujuan Rencana Strategis (Renstra) yang akan dicapai hendaknya dapat diukur dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar memiliki 2 bidang urusan, yaitu Kebudayaan dan Pariwisata. Karena memiliki 2 bidang urusan, kondisi ini menjadikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 2 sasaran utama, yaitu Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan dan Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sasaran Meningkatnya Seni dan Budaya, tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal, tetapi juga untuk menjadikan seni dan budaya sebagai pendorong kreativitas, ketentraman sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Seni dan budaya juga memegang peranan penting dalam membentuk

karakter masyarakat yang berdaya, beridentitas, dan beradab. Oleh karena itu, peningkatan seni dan budaya diarahkan untuk menciptakan ekosistem budaya yang memungkinkan semua unsur masyarakat, khususnya pelaku budaya dan generasi muda, untuk terlibat aktif dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya.

Sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang kedua adalah Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki hubungan yang erat dan saling memperkuat. Pengembangan pariwisata mendorong permintaan terhadap produk kreatif lokal dan jasa wisata, sementara ekonomi kreatif memperkaya atraksi, pengalaman, dan daya tarik wisata. Oleh karena itu, sasaran ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan kedua sektor secara bersama, melalui pendekatan yang kolaboratif, inovatif, dan berbasis pada kearifan lokal.

Melalui kedua sasaran ini, diharapkan tercipta ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan seni dan budaya, serta pariwisata dan ekonomi kreatif yang dinamis, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai lokal. Seni dan budaya yang berkembang secara sehat juga akan berdampak positif terhadap sektor lainnya seperti pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif begitu pula sebaliknya, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan meningkatnya seni dan budaya serta pariwisata dan ekonomi kreatif, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata turut berperan dalam menciptakan masyarakat yang kreatif, berbudaya, dan berdaya saing tinggi sekaligus menjaga warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan itu, maka untuk mencapai pertumbuhan, pembangunan, dan perekonomian daerah, Rencana Strategis (Renstra) pada periode tahun 2025-2029 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang tertera pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PADA TAHUN KE -						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Mewujudkan Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal										
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Terwujudnya berkebudayaan maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,71	59,81	59,91	50,01	60,89	61,10	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PADA TAHUN KE -						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan	Angka Kumulatif Jumlah Cagar budaya yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan	561	563	565	567	569	571	
			Angka Kumulatif Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan	917	927	937	947	957	967	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PADA TAHUN KE -						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Angka Kumulatif Jumlah Warisan Budaya TakBenda (WBTB) yang ditetapkan	52	54	56	58	60	62	
			Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang ditetepakan	42	44	46	48	50	52	
			Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni	45	47	49	51	53	55	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PADA TAHUN KE -						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum	83.967	85.646	87.359	89.106	90.889	92.706	
			Persemtase Kunjungan Wisatawan ke Museum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PADA TAHUN KE -						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah	Terwujudnya berkebudayaan maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	
		Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Wisatawan Mancanegara	2.014	2.209	2.320	2.436	2.557	2.684	
			Jumlah Wisatawan Nusantara	19.050.274	20.002.788	21.002.927	22.053.073	23.155.727	24.313.513	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PADA TAHUN KE -						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	3.030.000.000	3.060.300.000	3.090.903.000	3.121.812.030	3.153.030.150	3.184.560.452	
			Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang ditetapkan	140	145	150	155	160	165	
			Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	63.240	64.504	65.794	67.109	68.451	69.820	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET PADA TAHUN KE -						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Angka Kumulatif Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Rekomendasi Izin	43	48	53	58	63	68	
			Jumlah Tenaga Kerja Parekraf yang Tersertifikasi	15	20	25	30	35	40	
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3 Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan faktor-faktor yang menjadi peluang dan kendala, dan dengan memperhatikan berbagai sumber daya yang ada, maka dapat dirumuskan strategi dan upaya-upaya yang harus dilakukan, yaitu:

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata:

1. Pengenalan potensi daya tarik wisata Sumatera Selatan yang siap dipromosikan di pasar-pasar potensial di dalam dan luar negeri.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Selatan melalui pusat-pusat informasi wisatawan.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Daya Tarik Wisata di Sumatera Selatan secara terpadu dengan dukungan instansi terkait.
4. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan warisan nilai-nilai budaya, seni dan warisan sejarah dan purbakala yang dilaksanakan secara terpadu dengan dukungan instansi terkait secara berkelanjutan, dan dengan memperhatikan prioritas pembangunan.
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas karya seni dan film melalui peningkatan sarana pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya dengan tetap menjunjung tinggi tradisi, kerarifan lokal dan jati diri bangsa di kota-kota dan ibukota Kabupaten di Sumatera Selatan.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang kebudayaan dan pariwisata.
7. Meningkatkan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, Media, Desain dan IPTEK.

3.4 Penahapan Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran secara bertahap dan terukur, pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) selama periode lima tahun dirancang melalui pendekatan penahapan yang sistematis dan

berkelanjutan. Penahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap target kinerja dapat dicapai secara realistis dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, dinamika lingkungan strategis, serta prioritas pembangunan daerah.

Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah merumuskan 5 penahapan Rencana Strategis (Renstra) selama 5 tahun ke depan pada tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

TAHAP I (2026)	**TAHAP II (2027)**	**TAHAP III (2028)**	**TAHAP IV (2029)**	**TAHAP V (2030)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fokus: Konsolidasi & Fondasi: • Penyusunan masterplan destinasi prioritas • Pendataan & digitalisasi aset kebudayaan • Revitalisasi awal destinasi unggulan • *Capacity building* SDM pariwisata	**Fokus: Penguatan Infrastruktur & Promosi, Pembangunan Sarana dan Prasarana Destinasi:** • Festival budaya & *sport tourism* • *Branding* pariwisata digital • Pengembangan ekosistem ekraf	**Fokus: Hilirisasi & Diversifikasi:** • Hilirisasi produk ekraf • Diversifikasi paket wisata *heritage*, religi, ekowisata • Kemitraan investasi amenitas wisata • Digitalisasi layanan pariwisata	**Fokus: Ekspansi & Daya Saing Global:** • Event internasional budaya & olahraga • Penetapan destinasi sebagai KSPP • Kerjasama internasional	**Fokus: Konsolidasi & Keberlanjutan:** • Evaluasi capaian RENSTRA & *roadmap* pasca 2030 • Penerapan *green tourism* • Peningkatan kontribusi pariwisata ke PDRB • Pengakuan UNESCO warisan budaya

3.5 Penyajian Lokus Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Dengan rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan pelaksanaan lokus akan dilaksanakan di 17 Kabupaten/kota namun dalam hal ini menyelaraskan dengan program strategis Gubernur dan Walik Gubernur Sumatera Selatan, lokus pengembangan kebudayaan dan pariwisata dalam kurun waktu lima tahun (2025-2029) antara lain di Kota Palembang, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam.

3.6 Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Dengan rangka mewujudkan tujuan dan sasaran, serta merespons dinamika global, nasional, dan lokal yang memengaruhi sektor kebudayaan dan pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menetapkan arah kebijakan. Arah kebijakan ini dirancang untuk memperkuat identitas budaya lokal, melestarikan seni dan budaya, meningkatkan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, serta mendorong kontribusi sektor budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.

Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah merumuskan arah kebijkan Rencana Strategis (Renstra) selama 5 tahun ke depan pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAK KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
		Revitalisasi Seni dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal:	• Revitalisasi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. • Mendorong pertukaran budaya lintas provinsi/negara. • Promosi seni budaya melalui diplomasi festival, kerja sama G to G dan G to B.	
		Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**1. Penguatan Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal :** • Fokus pada pengembangan destinasi unggulan seperti Sungai Musi, Danau Ranau, Bukit	

			Siguntang, Wisata Gunung Dempo dan Wisata Religi. • Kolaborasi dengan komunitas, pelaku usaha, dan akademisi (pendekatan pentahelix). • Pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi destinasi dan pelestarian budaya (*e-tourism*, museum digital, peta wisata interaktif). • Penguatan media sosial dan branding digital "#WonderfulSouthSumatra". **2. Pemulihan Ekonomi melalui Sektor Budaya dan Pariwisata :** • Dukungan penuh pada UMKM pariwisata, pelaku seni budaya, dan event lokal sebagai motor pemulihan ekonomi pasca-pandemi. • Fasilitasi akses permodalan, pameran, dan digital marketplace.	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA BIDANG URUSAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

4.1 Teknik Merumuskan dan Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Permendagri Nomor 90 tahun 2019 maka dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Rencana Program Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengembangan Kebudayaan
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
4. Program Pembinaan Sejarah
5. Program Pelestarian dan Cagar Budaya
6. Program Pengelolaan Permuseuman
7. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
8. Program Pemasaran Pariwisata
9. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Eknomi Kreatif

Kegiatan dari Program di atas terlampir pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Mewujudkan Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal							
Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	**Terwujudnya berkebudayaan maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**				**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**		
		Meningkatnya Seni dan Budaya yang Dilestarikan			Persentase peningkatan Seni dan Budaya		
			1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan		1. Indeks Pembangunan Kebudayaan 2. Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan 3. Angka Kumulatif	**1. Program Pengembangan Kebudayaan**	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan		
				1. Terselenggaranya event/kegiatan budaya yang melibatkan masyarakat secara aktif	Jumlah Peserta atau Partisipatif masyarakat dalam event/kegiatan budaya	**1.1. Kegiatan** : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						1.1.1 Sub. Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
						1.1.2 Sub. Kegiatan : Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	
				2. Terlaksananya kegiatan pelatihan/kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kebudayaan	Jumlah Peserta pelatihan/kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kebudayaan	**1.2. Kegiatan** : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						1.2.1 Sub. Kegiatan : Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
				3. Terbangunnya kemitraan antara pemerintah dan komunitas budaya lokal	Jumlah kesepakatan kemitraan antara pemerintah dan komunitas budaya lokal	**1.3. Kegiatan** : Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	
						1..3.1 Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan,	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
						Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
				4. Terlaksananya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	Jumlah Objek Pemajuan lembaga adat yang telah dilakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan	**1.4. Kegiatan** : Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
						1.4.1 Sub. Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	
			2. Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional		1. Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni 2. Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	**2. Program : Pengembangan Kesenian Tradisional**	
				1. Terfasilitasinya ruang ekspresi dan promosi kesenian tradisional oleh masyarakat	Jumlah fasilitas ruang ekspresi dan promosi kesenian tradisional oleh masyarakat	**2.1 Kegiatan :** Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						2.1.1 Sub. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
				2. Terwujudnya kemitraan antara pemerintah dan komunitas kesenian tradisional	Jumlah kemitraan antara pemerintah dan komunitas kesenian tradisional	**2.2 Kegiatan :** Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
						2.2.1 Sub. Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
				3. Terselenggaranya pertunjukan atau festival kesenian tradisional yang melibatkan partisipasi masyarakat"	Jumlah Peserta atau Partisipatif masyarakat pertunjukan atau festival kesenian tradisional	**2.3 Kegiatan :** Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
						2.3.1 Sub. Kegiatan : Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
			3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	**3. Program : Pembinaan Sejarah**	
				1.Tersedianya media informasi sejarah yang dapat diakses oleh masyarakat	Jumlah media informasi sejarah yang dapat diakses oleh masyarakat	**3.1 Kegiatan :** Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
						3.1.1 Sub. Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	
				2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi atau edukasi sejarah bagi masyarakat	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi sejarah bagi masyarakat	**3.2 Kegiatan :** Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
						3.2.1 Sub. Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
				3. Terselenggaranya pameran atau event sejarah terbuka untuk publik	Jumlah pameran dan event sejarah terbuka untuk publik	**3.2 Kegiatan :** Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	
						3.2.1 Sub. Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	
			4. Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan		1. Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 2. Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan 3. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	**4. Program : Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	
				1.Terdokumentasikannya warisan budaya (benda dan takbenda) dalam bentuk arsip, video, tulisan, atau digital	Jumlah dokumentasi (benda dan tak benda) dalam bentuk arsip, video, tulisan, atau digital	**4.1 Kegiatan :** Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
						4.1.1 Sub Kegiatan : Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
						4.1.2 Sub Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
				2. Terlaksananya kegiatan pelestarian warisan budaya oleh masyarakat atau pemerintah	Jumlah kegiatan pelestarian warisan budaya oleh masyarakat atau pemerintah	**4.2 Kegiatan :** Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
						4.2.1 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	
				3. Terdaftarnya Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) sebagai Cagar Budaya (CB) berperingkat daerah / nasional / internasional	Jumlah Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	**4.3 Kegiatan :** Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
						4.3.1 Sub Kegiatan : Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 4.3.1.1	
				4. Terlaksananya kegiatan pelatihan/kegiatan tenaga pelestari cagar budaya	Jumlah event promosi dan edukasi warisan budaya kepada masyarakat	**4.4 Kegiatan :** Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	
						4.4.1 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	
				5.Tersedianya sarana dan prasarana pelestarian warisan budaya	Jumlah sarana dan prasarana pelestarian warisan budaya	**4.5 Kegiatan :** Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
						4.5.1 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	
			5. Meningkatnya Tata Kelola Museum		1. Jumlah Kunjungan Museum 2. Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	**5. Program : Pengelolaan Permuseuman**	
				1. Tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan museum	Persentase keberhasilan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan museum	**5.1 Kegiatan :** Pengelolaan Museum Provinsi	
						5.1.1 Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	
						5.1.2 Sub Kegiatan : Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
				2. Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengelola museum	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas SDM pengelola museum	**5.2 Kegiatan :** Pengelolaan Museum Provinsi	
						5.2.1 Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
						5.2.2 Sub Kegiatan : Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
				3. Terselenggaranya kegiatan digitalisasi koleksi museum	Jumlah kegiatan digitalisasi koleksi museum	**5.3 Kegiatan :** Pengelolaan Museum Provinsi	
						5.3.1 Sub Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	
						5.3.2 Sub Kegiatan : Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
				4. Tersedianya sistem informasi manajemen museum	Persentase frekuensi penggunaan sistem informasi manajemen museum	**5.4 Kegiatan :** Pengelolaan Museum Provinsi	
						5.4.1 Sub Kegiatan : Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
				5. Terbangunnya kemitraan museum dengan lembaga pendidikan, komunitas, atau lembaga budaya	Jumlah kesepakatan kemitraan museum dengan lembaga pendidikan, komunitas, atau lembaga budaya	**5.5 Kegiatan :** Pengelolaan Museum Provinsi	
						5.5.1 Sub Kegiatan : Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
				6. Terselenggaranya program perbaikan sarana dan prasarana museum	Persentase terselenggaranya program perbaikan sarana dan prasarana museum	**5.6 Kegiatan :** Pengelolaan Museum Provinsi	
						5.6.1 Sub Kegiatan : Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
			5. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase tercapainya penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	**6. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**	
				1. Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	**6.1 Kegiatan :** Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						6.1.1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						6.1.2 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
						6.1.3 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						6.1.4 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan E-Walidata pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				2. Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terselenggaranya dokumen keuangan perangkat daerah	**6.2 Kegiatan :** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						6.2.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						6.2.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						6.2.3 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				3. Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terselenggaranya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	**6.3 Kegiatan :** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
						6.3.1 Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						6.3.2 Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	
				4. Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Persentase terselenggaranya dokumen administrasi umum perangkat daerah	**6.4 Kegiatan :** Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						6.4.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						6.4.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						6.4.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						6.4.4 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						6.4.5 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Kosnsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
				5. Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**6.5 Kegiatan :** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						6.5.1 Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
						6.5.2 Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				6. Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	**6.6 Kegiatan :** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						6.6.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						6.6.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						6.6.3 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				6. Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang	**6.7 Kegiatan :** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
				urusan pemerintahan daerah	urusan pemerintahan daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	
						6.7.1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						6.7.2 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						6.7.2 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						6.7.3 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Mewujudkan Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal							
Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah	**Terwujudnya berkebudayaan maju dan Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan**				**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum**		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
	Ekonomi Kreatif						
		Mengembangkan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Persentase keberhasilan pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
			7. Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		1. Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan 2. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	**7. Program : Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	
				1. Terlaksananya kegiatan pengembangan atraksi wisata berbasis potensi lokal	Jumlah kegiatan pengembangan atraksi wisata berbasis potensi lokal	**7.1 Kegiatan :** Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
						7.1.1 Sub Kegiatan : Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
				2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung destinasi pariwisata	Jumlah sarana dan prasarana pendukung destinasi pariwisata	**7.2 Kegiatan :** Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
						7.2.1 Sub Kegiatan : Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
				3. Terselenggaranya event pariwisata yang menarik minat wisatawan	Jumlah event pariwisata yang menarik minat wisatawan	**7.3 Kegiatan :** Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
						7.3.1 Sub Kegiatan : Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	
				4. Terlaksananya promosi destinasi melalui media digital dan konvensional	Persentase frekuensi promosi destinasi melalui media digital dan konvensional	**7.4 Kegiatan :** Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
						7.4.1 Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	
				5. Tersedianya paket wisata yang inovatif dan mudah diakses wisatawan	Jumlah paket wisata yang inovatif dan mudah diakses wisatawan	**7.5 Kegiatan :** Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
						7.5.1 Sub Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
				6. Terbangunnya kemitraan dengan pelaku usaha dan komunitas lokal untuk mendukung daya tarik destinasi	Jumlah kemitraan dengan pelaku usaha dan komunitas lokal untuk mendukung daya tarik destinasi yang terfasilitasi	**7.6 Kegiatan :** Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
						7.6.1 Sub Kegiatan : Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
						7.6.2 Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi	
			8. Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata		1. Jumlah Wisatawan Mancanegara 2. Jumlah Wisatawan Nusantara 3. Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	**8. Program : Pemasaran Pariwisata**	
				1. Terlaksananya promosi destinasi pariwisata melalui media digital dan konvensional	Jumlah promosi destinasi pariwisata melalui media digital dan konvensional	**8.1 Kegiatan :** Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
						8.1.1 Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
				2. Terselenggaranya keikutsertaan dalam event promosi pariwisata nasional dan internasional	Jumlah keikutsertaan dalam event promosi pariwisata nasional dan internasional	**8.2 Kegiatan :** Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
						8.2.1 Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
				3. Tersedianya konten kreatif promosi pariwisata berbasis potensi lokal	Jumlah konten kreatif promosi pariwisata berbasis potensi lokal yang tersedia	**8.3 Kegiatan :** Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
						8.3.1 Sub Kegiatan : Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
				4. Terbangunnya kemitraan strategis dengan pelaku usaha pariwisata dan media	Jumlah kesepakatan kemitraan strategis dengan pelaku usaha pariwisata dan media yang terfasilitasi	**8.4 Kegiatan :** Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
						8.4.1 Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
				5. Terlaksananya kampanye pemasaran terpadu destinasi pariwisata	Jumlah kampanye pemasaran terpadu destinasi pariwisata	**8.5 Kegiatan :** Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
						8.5.1 Sub Kegiatan : 1 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
			9. Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	**9. Program : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	
				1. Terlaksananya program peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Persentase peningkatan program kapasitas pelaku ekonomi kreatif	**9.1 Kegiatan :** Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
						9.1.1 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	
				2. Tersedianya fasilitas pendukung kegiatan ekonomi kreatif	Jumlah fasilitas pendukung kegiatan ekonomi kreatif	**9.2 Kegiatan :** Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
						9.2.1 Sub Kegiatan : Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	
				3. Terselenggaranya kegiatan promosi dan pemasaran produk kreatif lokal	Jumlah kegiatan promosi dan pemasaran produk kreatif lokal	**9.3 Kegiatan :** Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
						9.3.1 Sub Kegiatan : Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	
				4. Terjalinnya kemitraan antar pelaku kreatif, dunia usaha, dan pemerintah	Jumlah kemitraan antar pelaku kreatif, dunia usaha, dan pemerintah yang terfasilitasi	**9.4 Kegiatan :** Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
						9.4.1 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	
				5. Tersusunnya regulasi atau kebijakan pendukung subsektor ekonomi kreatif	Jumlah Dokumen atau regulasi pendukung subsektor ekonomi kreatif	**8.5 Kegiatan :** Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
						8.5.1 Sub Kegiatan : Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	**10. Program : Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	
				1. Terlaksananya program pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata	Jumlah program pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata	**10.1 Kegiatan :** Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
						10.1.1 Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Ket.
				2. Terlaksananya pelatihan teknis bagi pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelatihan teknis bagi pelaku ekonomi kreatif	**10.2 Kegiatan :** Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
						10.2.1 Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
				3. Terlaksananya pengembangan jejaring SDM pariwisata dan kreatif	Jumlah kegiatan pengembangan jejaring SDM pariwisata dan kreatif	**10.3 Kegiatan :** Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
						10.3.1 Sub Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
				4. Tersedianya modul dan bahan ajar pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah modul dan bahan ajar pelatihan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	**10.4 Kegiatan :** Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
						10.4.1 Sub Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	**Rp28.226.540.438**	100%	**Rp37.993.412.898**	100%	**Rp32.879.606.640**	100%	**Rp33.873.586.972**	100%	**Rp33.873.586.972**	100%	**Rp34.873.586.972**			Sumatera Selatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp71.000.000		Rp71.000.000		Rp71.000.000		Rp74.550.000		Rp74.550.000		Rp74.550.000			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp26.000.000	3 Dokumen	Rp16.000.000	3 Dokumen	Rp16.000.000	3 Dokumen	Rp16.300.000	3 Dokumen	Rp16.300.000	3 Dokumen	Rp16.300.000			
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah		3 Laporan	Rp45.000.000	3 Laporan	Rp45.000.000	3 Laporan	Rp45.000.000	3 Laporan	Rp48.250.000	3 Laporan	Rp48.250.000	3 Laporan	Rp48.250.000			
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Laporan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		3 Laporan	Rp0	3 Laporan	Rp10.000.000	3 Laporan	Rp10.000.000	3 Laporan	Rp10.000.000	3 Laporan	Rp10.000.000	3 Laporan	Rp10.000.000			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp23.514.515.463		Rp32.919.393.923		Rp27.505.587.665		Rp28.295.867.048		Rp28.295.867.048		Rp29.295.867.048			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	Rp18.455.216.540	12 Bulan	Rp27.915.095.000	12 Bulan	Rp21.139.933.502	12 Bulan	Rp22.196.930.177	12 Bulan	Rp22.196.930.177	12 Bulan	Rp23.196.930.177			
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	Rp5.044.298.923	3 Dokumen	Rp4.989.298.923	3 Dokumen	Rp6.340.654.163	3 Dokumen	Rp6.072.686.871	3 Dokumen	Rp6.072.686.871	3 Dokumen	Rp6.072.686.871			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Rp15.000.000	1 Laporan	Rp15.000.000	1 Laporan	Rp25.000.000	1 Laporan	Rp26.250.000	1 Laporan	Rp26.250.000	1 Laporan	Rp26.250.000			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp14.000.000		Rp95.000.000		Rp145.000.000		Rp99.750.000		Rp99.750.000		Rp99.750.000			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	12 Orang	Rp14.000.000	12 Orang	Rp95.000.000	12 Orang	Rp95.000.000	12 Orang	Rp99.750.000	12 Orang	Rp49.750.000	12 Orang	Rp49.750.000			
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut kelengkapannya			Rp0		Rp0		Rp50.000.000		Rp0		Rp50.000.000		Rp50.000.000			
Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp1.548.361.882		Rp1.695.855.882		Rp1.695.855.882		Rp1.780.648.676		Rp1.780.648.676		Rp1.780.648.676			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp200.000.000	12 Paket	Rp200.000.000	12 Paket	Rp200.000.000	12 Paket	Rp210.000.000	12 Paket	Rp210.000.000	12 Paket	Rp210.000.000			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp200.000.000	12 Paket	Rp200.000.000	12 Paket	Rp200.000.000	12 Paket	Rp210.000.000	12 Paket	Rp210.000.000	12 Paket	Rp210.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Rp150.000.000	12 Paket	Rp150.000.000	12 Paket	Rp150.000.000	12 Paket	Rp157.500.000	12 Paket	Rp157.500.000	12 Paket	Rp157.500.000			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	10 Dokumen	Rp75.000.000	10 Dokumen	Rp75.000.000	10 Dokumen	Rp75.000.000	10 Dokumen	Rp78.750.000	10 Dokumen	Rp78.750.000	10 Dokumen	Rp78.750.000			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	Rp923.361.882	4 Laporan	Rp1.070.855.882	4 Laporan	Rp1.070.855.882	4 Laporan	Rp1.124.398.676	4 Laporan	Rp1.124.398.676	4 Laporan	Rp1.124.398.676			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp300.000.000		Rp300.000.000		Rp550.000.000		Rp565.000.000		Rp565.000.000		Rp565.000.000			
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	Rp300.000.000	3 Unit	Rp300.000.000	3 Unit	Rp300.000.000	3 Unit	Rp315.000.000	3 Unit	Rp315.000.000	3 Unit	Rp315.000.000			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			0		Rp0		Rp250.000.000		Rp250.000.000		Rp250.000.000		Rp250.000.000			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.568.000.000		Rp1.568.000.000		Rp1.568.000.000		Rp1.646.400.000		Rp1.646.400.000		Rp1.646.400.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	Rp18.000.000	2 Laporan	Rp18.000.000	2 Laporan	Rp18.000.000	2 Laporan	Rp18.900.000	2 Laporan	Rp18.900.000	2 Laporan	Rp18.900.000			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	Rp1.250.000.000	24 Laporan	Rp1.250.000.000	24 Laporan	Rp1.250.000.000	24 Laporan	Rp1.312.500.000	24 Laporan	Rp1.312.500.000	24 Laporan	Rp1.312.500.000			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Rp300.000.000	12 Laporan	Rp300.000.000	12 Laporan	Rp300.000.000	12 Laporan	Rp315.000.000	12 Laporan	Rp315.000.000	12 Laporan	Rp315.000.000			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp1.210.663.093		Rp1.344.163.093		Rp1.344.163.093		Rp1.411.371.248		Rp1.411.371.248		Rp1.411.371.248			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	18 Unit	Rp600.163.093	18 Unit	Rp644.163.093	18 Unit	Rp644.163.093	18 Unit	Rp676.371.248	18 Unit	Rp676.371.248	18 Unit	Rp676.371.248			
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	Rp260.500.000	1 Unit	Rp200.000.000	1 Unit	Rp200.000.000	1 Unit	Rp210.000.000	1 Unit	Rp210.000.000	1 Unit	Rp210.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	Rp50.000.000	2 Unit	Rp200.000.000	2 Unit	Rp200.000.000	2 Unit	Rp210.000.000	2 Unit	Rp210.000.000	2 Unit	Rp210.000.000			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	Rp300.000.000	2 Unit	Rp300.000.000	2 Unit	Rp300.000.000	2 Unit	Rp315.000.000	2 Unit	Rp315.000.000	2 Unit	Rp315.000.000			
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	- Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan - Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan			**Rp3.555.000.000**		**Rp3.811.215.000**		**Rp8.507.500.000**		**Rp8.815.379.258**		**Rp8.882.875.000**		**Rp8.882.875.000**			Sumatera Selatan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp2.884.000.000		Rp2.740.215.000		Rp6.285.000.000		Rp6.515.379.258		Rp6.582.875.000		Rp6.582.875.000			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	10 Objek	10 Objek	Rp2.884.000.000	10 Objek	Rp2.740.215.000	10 Objek	Rp5.985.000.000	10 Objek	Rp6.132.883.516	10 Objek	Rp6.200.379.258	10 Objek	Rp6.200.379.258	**Program Strategis 8: Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya**		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	50 Orang	50 Orang	Rp0	50 Orang	Rp0	50 Orang	Rp300.000.000	50 Orang	Rp382.495.742	50 Orang	Rp382.495.742	50 Orang	Rp382.495.742			
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi				Rp671.000.000		Rp1.071.000.000		Rp2.000.000.000		Rp2.100.000.000		Rp2.100.000.000		Rp2.100.000.000			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek	10 Objek	Rp671.000.000	10 Objek	Rp1.071.000.000	10 Objek	Rp2.000.000.000	10 Objek	Rp2.100.000.000	10 Objek	Rp2.100.000.000	10 Objek	Rp2.100.000.000			
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				Rp0		Rp0		Rp222.500.000		Rp200.000.000		Rp200.000.000		Rp200.000.000			
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	2 Objek	Rp0	2 Objek	Rp0	2 Objek	Rp222.500.000	2 Objek	Rp200.000.000	2 Objek	Rp200.000.000	2 Objek	Rp200.000.000			
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Pergelaran Seni	100%	100%	**Rp146.000.000**		**Rp146.000.000**	**100,00%**	**Rp1.420.000.000**	**100%**	**Rp1.541.000.000**	**100%**	**Rp1.541.000.000**	**100%**	**Rp1.541.000.000**			Sumatera Selatan
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas				Rp146.000.000		Rp146.000.000		Rp1.420.000.000		Rp1.541.000.000		Rp1.541.000.000		Rp1.541.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Daerah Kabupaten/Kota																	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	75 Orang	75 Orang	Rp0	75 Orang	Rp0	75 Orang	Rp710.000.000	75 Orang	Rp795.500.000	75 Orang	Rp795.500.000	75 Orang	Rp795.500.000			
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	12 Lembaga	12 Lembaga	Rp146.000.000	12 Lembaga	Rp146.000.000	12 Lembaga	Rp710.000.000	12 Lembaga	Rp745.500.000	12 Lembaga	Rp745.500.000	12 Lembaga	Rp745.500.000			
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	100%	100%	**Rp62.000.000**	100%	**Rp0**	**100%**	**Rp1.220.500.000**	**100%**	**Rp1.231.525.000**	**100%**	**Rp1.231.525.000**	**100%**	**Rp1.231.525.000**			Sumatera Selatan
Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi				Rp62.000.000		Rp0		Rp1.220.500.000		Rp1.231.525.000		Rp1.231.525.000		Rp1.231.525.000			
Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp62.000.000	2 Dokumen	Rp0	2 Dokumen	Rp1.220.500.000	2 Dokumen	Rp1.231.525.000	2 Dokumen	Rp1.231.525.000	2 Dokumen	Rp1.231.525.000	**Program Strategis 8: Sumsel Religius, Toleransi dan Berbudaya**		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	- Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan - Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	100%	100%	**Rp203.000.000**	**100%**	**Rp250.000.000**	**100%**	**Rp1.498.750.000**	**100%**	**Rp1.523.687.500**	**100%**	**Rp1.523.687.500**	**100,00%**	**Rp1.523.687.500**			Sumatera Selatan
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				Rp203.000.000		Rp250.000.000		Rp1.223.750.000		Rp1.234.937.500		Rp1.234.937.500		Rp1.234.937.500			
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	50 Objek	50 Objek	Rp53.000.000	50 Objek	Rp100.000.000	50 Objek	Rp611.875.000	50 Objek	Rp617.468.750	50 Objek	Rp617.468.750	50 Objek	Rp617.468.750			
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5 Objek	5 Objek	Rp150.000.000	5 Objek	Rp150.000.000	5 Objek	Rp611.875.000	5 Objek	Rp617.468.750	5 Objek	Rp617.468.750	5 Objek	Rp617.468.750			
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi				Rp0		Rp0		Rp275.000.000		Rp288.750.000		Rp288.750.000		Rp288.750.000			
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	20 Orang	20 Orang	Rp0	20 Orang	Rp0	20 Orang	Rp275.000.000	20 Orang	Rp288.750.000	20 Orang	Rp288.750.000	20 Orang	Rp288.750.000			
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Kunjungan Museum	100%	100%	**Rp3.966.599.900**	**100%**	**Rp4.093.999.900**	**100%**	**Rp6.498.558.205**	**100%**	**Rp6.773.486.115**	**100%**	**Rp6.773.486.115**	**100,00%**	**Rp6.773.486.115**			Sumatera Selatan
Pengelolaan Museum Provinsi				Rp3.966.599.900		Rp4.093.999.900		Rp6.498.558.205		Rp6.773.486.115		Rp6.773.486.115		Rp6.773.486.115			
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	500 Unit	500 Unit	Rp3.782.599.900	500 Unit	Rp3.909.999.900	500 Unit	Rp5.977.722.100	500 Unit	Rp6.226.608.205	500 Unit	Rp6.226.608.205	500 Unit	Rp6.226.608.205			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	9 Unit	9 Unit	Rp184.000.000	9 Unit	Rp184.000.000	9 Unit	Rp520.836.105	9 Unit	Rp546.877.910	9 Unit	Rp546.877.910	9 Unit	Rp546.877.910			
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Wisata Pariwisata yang dikembangkan	100%	100%	**Rp611.800.000**	**100%**	**Rp797.300.000**	**100%**	**Rp2.441.250.000**	**100%**	**Rp2.563.312.500**	**100%**	**Rp2.563.312.500**	**100,00%**	**Rp2.563.312.500**			Sumatera Selatan
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				Rp340.000.000		Rp340.000.000		Rp1.016.250.000		Rp1.067.062.500		Rp1.067.062.500		Rp1.067.062.500			
Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	4 Lokasi	4 Lokasi	Rp300.000.000	4 Lokasi	Rp300.000.000	4 Lokasi	Rp400.000.000	4 Lokasi	Rp420.000.000	4 Lokasi	Rp420.000.000	4 Lokasi	Rp420.000.000			
Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen *Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi*	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp0	4 Dokumen	Rp0	4 Dokumen	Rp366.250.000	4 Dokumen	Rp384.562.500	4 Dokumen	Rp384.562.500	4 Dokumen	Rp384.562.500			
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp40.000.000	2 Dokumen	Rp40.000.000	2 Dokumen	Rp250.000.000	2 Dokumen	Rp262.500.000	2 Dokumen	Rp262.500.000	2 Dokumen	Rp262.500.000			
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				Rp142.000.000		Rp337.500.000		Rp800.000.000		Rp840.000.000		Rp840.000.000		Rp840.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2 Laporan	2 Laporan	Rp142.000.000	2 Laporan	Rp337.500.000	2 Laporan	Rp800.000.000	2 Laporan	Rp840.000.000	2 Laporan	Rp840.000.000	2 Laporan	Rp840.000.000			
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				Rp129.800.000		Rp119.800.000		Rp625.000.000		Rp656.250.000		Rp656.250.000		Rp656.250.000			
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp105.800.000	2 Dokumen	Rp105.800.000	2 Dokumen	Rp275.000.000	2 Dokumen	Rp288.750.000	2 Dokumen	Rp288.750.000	2 Dokumen	Rp288.750.000			
Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata	2 Laporan	2 Laporan	Rp24.000.000	2 Laporan	Rp14.000.000	2 Laporan	Rp350.000.000	2 Laporan	Rp367.500.000	2 Laporan	Rp367.500.000	2 Laporan	Rp367.500.000			
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	- Jumlah Wisatawan Mancanegara - Jumlah Wisatawan Nusantara - Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	100%	100%	**Rp3.715.580.367**	**100%**	**Rp3.368.300.000**	100%	**Rp10.812.250.000**	**100%**	**Rp10.900.000.000**	**100%**	**Rp11.832.504.258**	**100%**	**Rp12.832.504.258**			Sumatera Selatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				Rp3.715.580.367		Rp3.368.300.000		Rp10.812.250.000		Rp10.900.000.000		Rp11.832.504.258		Rp12.832.504.258			
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Dokumen	9 Dokumen	Rp640.930.367	9 Dokumen	Rp530.000.000	9 Dokumen	Rp2.000.000.000	9 Dokumen	Rp2.100.000.000	9 Dokumen	Rp2.205.000.000	9 Dokumen	Rp3.205.000.000			
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	13 Laporan	13 Laporan	Rp3.031.400.000	13 Laporan	Rp2.788.300.000	13 Laporan	Rp8.312.250.000	13 Laporan	Rp8.275.000.000	13 Laporan	Rp8.688.750.000	13 Laporan	Rp8.688.750.000	**Program Strategis 9: Sumsel Wonderful 2030**		
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen *Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata*	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp43.250.000	2 Dokumen	Rp50.000.000	2 Dokumen	Rp500.000.000	2 Dokumen	Rp525.000.000	2 Dokumen	Rp938.754.258	2 Dokumen	Rp938.754.258			
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	100%	100%	**Rp7.000.000**	100%	**Rp467.000.000**	100%	**Rp1.682.500.000**	**100%**	**Rp1.716.625.000**	**100%**	**Rp2.716.625.000**	**100%**	**Rp2.716.625.000**			Sumatera Selatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				Rp7.000.000		Rp17.000.000		Rp750.000.000		Rp737.500.000		Rp1.000.000.000		Rp1.000.000.000			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan	1 Laporan	Rp7.000.000	1 Laporan	Rp17.000.000	1 Laporan	Rp750.000.000	1 Laporan	Rp737.500.000	1 Laporan	Rp1.000.000.000	1 Laporan	Rp1.000.000.000			
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				Rp0		Rp450.000.000		Rp932.500.000		Rp979.125.000		Rp1.716.625.000		Rp1.716.625.000			
Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreaitf	Jumlah Laporan Hasil Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif			Rp0	1 Laporan	Rp450.000.000	1 Laporan	Rp932.500.000	1 Laporan	Rp979.125.000	1 Laporan	Rp1.716.625.000	1 Laporan	Rp1.716.625.000			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Kompeten	100%	100%	**Rp118.700.000**	**100%**	**Rp118.700.000**	**100%**	**Rp2.446.250.000**	**100%**	**Rp2.468.562.500**	**100,00%**	**Rp2.468.562.500**	**100,00%**	**Rp2.468.562.500**			Sumatera Selatan
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				Rp118.700.000		Rp118.700.000		Rp1.475.000.000		Rp1.918.562.500		Rp1.918.562.500		Rp1.918.562.500			
Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Kompetensinya	250 Orang	250 Orang	Rp118.700.000	250 Orang	Rp118.700.000	250 Orang	Rp1.475.000.000	250 Orang	Rp1.918.562.500	250 Orang	Rp1.918.562.500	250 Orang	Rp1.918.562.500			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												PROGRAM STRATEGIS HDCU	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL	Ket
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	50 Orang	50 Orang	Rp0	50 Orang	Rp. 0	50 Orang	Rp921.250.000	50 Orang	Rp500.000.000	50 Orang	Rp500.000.000	50 Orang	Rp500.000.000			
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Rp0		Rp0		Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000		Rp50.000.000			
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0	250 Orang	Rp0	250 Orang	Rp0	250 Orang	Rp50.000.000	250 Orang	Rp50.000.000	250 Orang	Rp50.000.000	250 Orang	Rp50.000.000			
				Rp40.612.220.705		**Rp51.045.927.798**		**Rp69.407.164.845**		**Rp71.407.164.845**		**Rp73.407.164.845**		**Rp75.407.164.845**			

4.2 Subkegiatan Prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pelestarian warisan budaya menjadi pilar utama, sehingga gencar dilakukan revitalisasi cagar budaya dan mendukung komunitas adat dalam menjaga tradisi lisan, seni pertunjukan, dan upacara adat mereka. Dengan kegiatan ini, harapannya dapat memastikan bahwa generasi mendatang tetap terhubung dengan akar budaya mereka, sekaligus menarik minat wisatawan nusantara dan mancanegara. Upaya ini berkontribusi pada penguatan identitas daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelestarian nilai-nilai luhur. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memegang peran krusial dalam pelestarian serta pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan. Tidak hanya berperan sebagai penjaga kelestarian, tetapi juga sebagai penggerak untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.

Pada periode pemerintahan tahun 2025-2029, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berhubungan dengan Misi Pemerintah Nomor 2 dan 7, yaitu 1) Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat; dan 2) Mewujudkan Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal. Selain itu, Dinas Kebudayaan juga masuk ke dalam Program Strategis Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 dan 9, yaitu 1) Sumatera Selatan Religius, Toleransi, dan Berbudaya; dan 2) Sumsel Wonderfull 2030.

Oleh karena itu, demi mewujudkan tercapainya Misi dan Program tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkomitmen untuk mendukung penuh dengan cara menyelaraskan program prioritas yang mendukung pembangunan daerah, yang dijelaskan pada Tabel 4.4 di bawah ini.

Table 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi:** Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota:** Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
3.	Program Pembinaan Sejarah	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	**Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi:** Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi:** Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	
5.	Program Pengelolaan Permuseuman	Meningkatnya Tata Kelola Museum	**Pengelolaan Museum Provinsi:** Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	
			Pengelolaan Museum Provinsi: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	
6.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi:** Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi: Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi: Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi: Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi: Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi: Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Daerah Provinsi	
7.	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi:**	

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi: Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi: Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
8.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif	**Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif:** Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	
9.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan:** Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	

4.3 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunaan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Oleh karena itu, telah ditetapkan indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persentase	57,51	58,71	59,81	59,91	60,01	60,89	61,10	
2.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum	Persentase	2,01	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	
3.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	2.004	2.014	2.209	2.320	2.436	2.557	2.684	
5.	Jumlah Wisatawan Nusantara	Orang	16.123.645	19.050.274	20.002.788	21.002.927	22.053.073	23.155.727	24.313.513	
6.	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rupiah	-	3.030.000.000	3.060.300.000	3.090.903.000	3.121.812.030	3.153.030.150	3.184.560.452	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Angka Kumulatif Jumlah Cagar budaya yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan	Cagar Budaya	559	561	563	565	567	569	571	
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Angka Kumulatif Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terlindungi, termanfaatkan dan dikembangkan	OPK	907	917	927	937	947	957	967	
4.	Angka Kumulatif Jumlah Warisan Budaya TakBenda (WBTB) yang ditetapkan	Sertifikat	50	52	54	56	58	60	62	
5.	Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Cagar Budaya	39	42	44	46	48	50	52	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya TakBenda yang Ditetapkan	Persentase	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni	Pergelaran	45	45	47	49	51	53	55	
8.	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum	Orang	88.351	83.967	85.646	87.359	89.106	90.889	92.706	
10.	Persentase Kunjungan Wisatawan Ke Museum	Persentase	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
11.	Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang ditetapkan	Desa Wisata	135	140	145	150	155	160	165	
12.	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	62.000	63.240	64.504	65.794	67.109	68.451	69.820	

No.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13.	Angka Kumulatif Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Rekomendasi Izin	Pelaku Usaha	-	43	48	53	58	63	68	
14.	Jumlah Tenaga Kerja Parekraf yang Tersertifikasi	Orang	-	15	20	25	30	35	40	
15.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan merupakan acuan panduan bagi seluruh bidang atau unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Parwisata Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan Rencana Strategis (Renstra) ini dapat menjadi komitmen dan konsisten dalam membawa arah dan peran yang baik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam perumusan Rencana Strategis (Renstra) sehingga tercapainya tujuan organisasi yang berhasil dengan baik. Serta mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta menjawab tantangan pembangunan masa kini dan masa depan, Dalam upaya mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global maupun tantangan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan secara konsisten mengarusutamakan sejumlah kaidah penting dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, yang meliputi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial sebagai upaya menjamin kesetaraan akses dan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan, pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara pelestarian nilai budaya, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kelestarian lingkungan, transformasi digital yang diarahkan pada pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan informasi budaya, promosi pariwisata berbasis digital, serta peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan rendah karbon melalui pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan dan efisiensi energi, serta pembangunan berketahanan iklim yang mengedepankan mitigasi risiko dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, sehingga seluruh proses

pembangunan di sektor kebudayaan dan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan daerah dalam jangka panjang

Semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan ini dapat dijadikan sebagai sumber data dan informasi untuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 agar tercapai realisasi indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang lebih baik. Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan setiap tahunnya. Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan seterusnya akan menjadi acuan atau pedoman penentuan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.